

EKONOMI PERBATASAN INDONESIA: ANTARA KETERGANTUNGAN, KERJA SAMA LINTAS NEGARA, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Melyana R Pugu

Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia

puguratana@yahoo.com

Abstract

This study discusses Indonesia's border economy as a strategic space shaped by economic dependence, cross-border cooperation, and development challenges. Border areas are not only territorial boundaries of state sovereignty but also dynamic zones of social, cultural, and economic interaction between local communities and neighboring countries. Using a library research method, this study analyzes relevant literature, including academic journals, policy documents, and institutional reports, on border economies, cross-border trade, regional cooperation, and local development. The findings show that economic dependence in Indonesia's border areas is mainly caused by geographical proximity to neighboring countries, limited domestic infrastructure, weak distribution networks, price differences, and easier access to external markets. Cross-border trade, both formal and informal, plays an important role in supporting local livelihoods, but it also raises governance issues, such as weak monitoring, unrecorded transactions, and potential smuggling. Furthermore, cross-border cooperation is identified as a strategic instrument to transform dependency into productive interdependence. However, this transformation requires stronger infrastructure, integrated governance, local economic empowerment, and active participation from the central government, local authorities, business actors, and border communities. The study concludes that Indonesia's border economy should not be viewed merely as a peripheral or security-based issue, but as a potential regional growth center. Therefore, development strategies must combine protection of sovereignty, improvement of welfare, local competitiveness, and sustainable cross-border cooperation.

Keywords: border economy, economic dependence, cross-border cooperation, regional development, Indonesia.

Pendahuluan

Wilayah perbatasan Indonesia memiliki posisi strategis karena tidak hanya merepresentasikan batas kedaulatan negara, tetapi juga menjadi ruang interaksi ekonomi, sosial, budaya, dan politik antara masyarakat Indonesia dengan negara tetangga. Dalam konteks pembangunan nasional, kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah pinggiran yang semata-mata berfungsi sebagai sabuk keamanan, melainkan sebagai beranda depan negara yang memiliki potensi besar dalam perdagangan lintas batas, mobilitas tenaga kerja, pariwisata, logistik, serta kerja sama ekonomi regional. Namun, kondisi geografis yang terpencar, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan akses terhadap pusat pertumbuhan membuat ekonomi perbatasan menghadapi kompleksitas pembangunan yang berbeda dari wilayah nonperbatasan. Studi tentang pembangunan perbatasan darat Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di kawasan ini terus dijalankan setiap tahun, tetapi keberlanjutan hasilnya masih sangat

bergantung pada kapasitas tata kelola, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Rahim et al., 2023).

Fenomena utama yang muncul dalam ekonomi perbatasan Indonesia adalah adanya ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap negara tetangga, baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok, akses pasar, layanan kesehatan, pendidikan, maupun aktivitas perdagangan harian. Di beberapa wilayah seperti perbatasan Indonesia–Malaysia, Indonesia–Timor Leste, dan Indonesia–Papua Nugini, masyarakat lokal sering kali memiliki hubungan ekonomi yang lebih intens dengan wilayah negara tetangga dibandingkan dengan pusat ekonomi domestik. Hal ini terjadi karena faktor jarak, biaya transportasi, perbedaan harga barang, kesamaan etnis dan budaya, serta kemudahan akses informal lintas batas. Penelitian mengenai perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan bilateral, tetapi juga oleh ketersediaan infrastruktur, integrasi kebijakan antarnegara, alokasi anggaran pemerintah, dan investasi pendukung wilayah perbatasan (Prameswari et al., 2024).

Di satu sisi, ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga dapat dipahami sebagai strategi adaptif masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam situasi keterbatasan akses domestik. Namun, di sisi lain, ketergantungan tersebut dapat menimbulkan persoalan serius bagi pembangunan nasional, seperti melemahnya daya saing produk lokal, tingginya praktik perdagangan informal, potensi penyelundupan, serta berkurangnya orientasi ekonomi masyarakat terhadap pusat pertumbuhan nasional. Studi tentang ekonomi informal di perbatasan Indonesia–Timor Leste menunjukkan bahwa perdagangan informal tumbuh karena adanya celah regulasi, keterbatasan akses terhadap sistem ekonomi formal, dan tingginya biaya transaksi dalam perdagangan legal (Nalle, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa ekonomi perbatasan tidak cukup dijelaskan melalui pendekatan administratif negara, tetapi juga perlu dilihat sebagai ruang ekonomi sosial yang dibentuk oleh kebutuhan praktis masyarakat lokal.

Selain persoalan ketergantungan, kerja sama lintas negara menjadi faktor penting dalam mengelola dinamika ekonomi perbatasan. Kerja sama lintas batas dapat membuka peluang penguatan perdagangan legal, pembangunan infrastruktur bersama, pengelolaan mobilitas penduduk, pengembangan pariwisata perbatasan, serta peningkatan keamanan ekonomi kawasan. Dalam konteks Indonesia–Malaysia, kerja sama lintas batas tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dengan pengelolaan mobilitas masyarakat yang memiliki ikatan keluarga, budaya, dan aktivitas ekonomi di kedua sisi perbatasan. Raharjo (2025) menunjukkan bahwa masyarakat tetap melakukan mobilitas lintas batas karena adanya ikatan ekonomi, sosial, dan budaya meskipun terdapat dinamika politik dan sengketa wilayah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa kerja sama lintas negara perlu dirancang bukan hanya sebagai kerja sama antarpemerintah, tetapi juga sebagai mekanisme yang memahami realitas kehidupan masyarakat perbatasan.

Meskipun demikian, tantangan pembangunan ekonomi perbatasan Indonesia masih cukup kompleks. Hambatan utama yang sering muncul meliputi keterbatasan konektivitas

jalan dan transportasi, minimnya fasilitas logistik, lemahnya akses digital, rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya kelembagaan ekonomi lokal, serta koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif. Dalam konteks pembangunan wilayah perbatasan secara global, kawasan perbatasan sering mengalami ketertinggalan pembangunan karena adanya hambatan regulasi, perbedaan tata kelola, perbedaan budaya, serta lemahnya koordinasi multi-level governance antara pemerintah pusat, daerah, dan aktor lintas negara. OECD (2024) menekankan bahwa wilayah lintas batas membutuhkan penguatan tata kelola multilevel agar hambatan pembangunan dapat dikurangi dan potensi integrasi ekonomi dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

Research problem dalam kajian ini terletak pada belum optimalnya kemampuan ekonomi perbatasan Indonesia untuk keluar dari pola ketergantungan terhadap negara tetangga, meskipun berbagai kebijakan pembangunan dan kerja sama lintas negara telah dilakukan. Pembangunan pos lintas batas negara, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kerja sama bilateral memang telah menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubah struktur ekonomi lokal menjadi lebih mandiri, produktif, dan terintegrasi dengan ekonomi nasional. Studi mengenai PLBN Sota di Merauke menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perbatasan dapat membawa perubahan sosial ekonomi bagi masyarakat lokal, namun dampaknya tetap bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menghubungkan fasilitas perbatasan dengan aktivitas ekonomi produktif dan kerja sama bilateral yang berkelanjutan (Pugu, 2025).

Research gap dari kajian-kajian sebelumnya adalah masih dominannya pembahasan ekonomi perbatasan dari perspektif infrastruktur fisik, keamanan wilayah, perdagangan lintas batas, atau hubungan bilateral secara terpisah. Belum banyak kajian yang secara integratif menghubungkan tiga aspek utama, yaitu ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan, kerja sama lintas negara, dan tantangan pembangunan wilayah dalam satu kerangka analisis. Raharjo (2025) bahkan menunjukkan bahwa literatur kerja sama lintas batas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia–Malaysia, masih lebih banyak berfokus pada konektivitas fisik wilayah darat dan belum cukup memberi perhatian pada dimensi kelembagaan serta hubungan people-to-people. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu melihat ekonomi perbatasan sebagai ruang interdependensi yang melibatkan negara, pasar, masyarakat lokal, dan aktor lintas negara secara simultan.

Research novelty atau kebaruan kajian ini terletak pada upaya membangun pemahaman konseptual mengenai ekonomi perbatasan Indonesia sebagai ruang yang berada di antara ketergantungan dan kerja sama. Kajian ini tidak hanya melihat ketergantungan sebagai kelemahan struktural, tetapi juga sebagai gejala interdependensi ekonomi yang dapat diarahkan menjadi peluang kerja sama lintas negara apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, kelembagaan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat lokal. **Research urgency** dari kajian ini menjadi semakin penting karena kawasan perbatasan berperan dalam menjaga kedaulatan ekonomi, memperkuat integrasi nasional, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendukung daya saing Indonesia dalam

kerja sama regional. Oleh karena itu, kajian tentang ekonomi perbatasan Indonesia perlu diarahkan untuk merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keamanan teritorial, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, keadilan pembangunan, dan kerja sama lintas negara yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **library research** atau studi kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik ekonomi perbatasan Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan, kerja sama lintas negara, perdagangan lintas batas, dan tantangan pembangunan wilayah perbatasan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kebaruan publikasi, kredibilitas sumber, serta kesesuaian dengan fokus kajian. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai posisi ekonomi perbatasan sebagai ruang interaksi antara kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat lokal, dan dinamika ekonomi regional.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis literatur. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan konsep ekonomi perbatasan, teori ketergantungan, interdependensi, kerja sama lintas negara, dan pembangunan wilayah. Tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan literatur berdasarkan isu utama, yaitu bentuk ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan, peluang kerja sama lintas negara, serta hambatan pembangunan yang dihadapi kawasan perbatasan Indonesia. Selanjutnya, data dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan kesenjangan kajian yang dapat menjelaskan mengapa wilayah perbatasan masih menghadapi ketimpangan pembangunan meskipun memiliki potensi ekonomi strategis. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menyusun argumentasi konseptual mengenai pentingnya transformasi ekonomi perbatasan dari pola ketergantungan menuju kerja sama lintas negara yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia masih berada dalam pola ketergantungan terhadap negara tetangga. Ketergantungan ini muncul karena masyarakat di kawasan perbatasan sering memiliki akses yang lebih dekat, cepat, dan murah ke pasar negara tetangga dibandingkan ke pusat ekonomi domestik. Dalam konteks perbatasan Indonesia–Malaysia, hubungan ekonomi masyarakat lokal dipengaruhi oleh kedekatan geografis, hubungan sosial-budaya, perbedaan harga, serta keterbatasan distribusi barang dari dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan

ekonomi bukan hanya persoalan pilihan konsumsi masyarakat, tetapi juga akibat dari ketimpangan konektivitas dan belum optimalnya pembangunan ekonomi lokal (Rahim et al., 2023; Rudiatin, 2025).

Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan akses domestik. Masyarakat memanfaatkan pasar negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok, memperoleh barang konsumsi, dan menjalankan aktivitas perdagangan harian. Namun, pola ini dapat menimbulkan persoalan jangka panjang apabila tidak disertai penguatan kapasitas ekonomi lokal. Ketergantungan yang berlangsung terus-menerus dapat melemahkan daya saing produk lokal, memperbesar arus barang informal, dan mengurangi orientasi ekonomi masyarakat terhadap pasar nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perbatasan perlu diarahkan untuk mengubah ketergantungan pasif menjadi hubungan ekonomi lintas batas yang lebih produktif dan saling menguntungkan (Raharjo, 2025a; Raharjo, 2025b).

2. Perdagangan Lintas Batas sebagai Ruang Ekonomi Formal dan Informal

Perdagangan lintas batas merupakan salah satu aktivitas utama dalam ekonomi perbatasan. Aktivitas ini menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal sekaligus sarana pertukaran barang dan jasa antarnegara. Dalam praktiknya, perdagangan lintas batas tidak selalu berlangsung melalui jalur formal, tetapi juga melalui mekanisme informal berbasis hubungan sosial, kekerabatan, kebiasaan lokal, dan kebutuhan praktis masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kawasan perbatasan memiliki karakter ekonomi yang berbeda dari wilayah pusat pertumbuhan, karena aktivitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh regulasi negara, tetapi juga oleh jaringan sosial masyarakat lokal (Rudiatin, 2025; Sari, 2024).

Perdagangan informal di wilayah perbatasan memiliki dua sisi. Di satu sisi, perdagangan informal membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara cepat dan murah. Di sisi lain, perdagangan informal dapat menimbulkan persoalan tata kelola, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya pencatatan transaksi, hilangnya potensi penerimaan negara, serta risiko penyelundupan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan ekonomi perbatasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga harus melalui formalisasi yang inklusif. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme perdagangan legal yang sederhana, biaya transaksi yang rendah, pasar perbatasan yang aktif, serta dukungan bagi pelaku usaha kecil agar dapat terlibat dalam perdagangan lintas batas secara resmi (Raharjo, 2025a; OECD, 2024).

3. Infrastruktur dan Konektivitas sebagai Faktor Penentu

Infrastruktur dan konektivitas merupakan faktor penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi perbatasan. Keterbatasan jalan, transportasi, pasar, jaringan komunikasi, listrik, dan fasilitas logistik menyebabkan biaya ekonomi di kawasan perbatasan menjadi tinggi. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terhubung dengan negara tetangga dibandingkan dengan pusat ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan tidak dapat dilepaskan dari persoalan

struktural berupa keterisolasian wilayah, rendahnya akses layanan dasar, dan lemahnya jaringan distribusi domestik (Rahim et al., 2023).

Pembangunan infrastruktur seperti Pos Lintas Batas Negara, jalan penghubung, pasar perbatasan, dan fasilitas logistik memang berperan penting dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Namun, pembangunan fisik tidak secara otomatis menciptakan kemandirian ekonomi apabila tidak diikuti dengan penguatan aktivitas produktif masyarakat. Infrastruktur harus dihubungkan dengan UMKM, pertanian, perdagangan legal, pariwisata perbatasan, industri kecil, dan ekonomi digital. Rahim et al. (2023) menegaskan bahwa pembangunan wilayah perbatasan diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, memberi efek pengganda, mengurangi kemiskinan, menarik investasi, serta mengatasi isolasi wilayah.

4. Kerja Sama Lintas Negara sebagai Peluang Strategis

Kerja sama lintas negara menjadi instrumen penting dalam mengelola ekonomi perbatasan secara produktif. Kerja sama tersebut dapat mencakup perdagangan lintas batas, pengelolaan mobilitas penduduk, pembangunan infrastruktur bersama, pengembangan pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan keamanan wilayah. Dalam konteks Indonesia–Malaysia, masyarakat perbatasan tetap melakukan mobilitas lintas batas karena adanya ikatan keluarga, budaya, dan ekonomi, meskipun terdapat dinamika politik dan sengketa wilayah tertentu (Raharjo, 2025b).

Namun, kerja sama lintas negara tidak cukup dipahami sebagai hubungan formal antarpemerintah pusat. Kerja sama yang efektif harus melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha lokal, komunitas perbatasan, lembaga adat, dan masyarakat sipil. Raharjo (2025a) menunjukkan bahwa literatur kerja sama lintas batas Indonesia–Malaysia masih banyak menekankan konektivitas fisik, sementara aspek kelembagaan dan hubungan antarmasyarakat masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan membangun hubungan *people-to-people* yang lebih berkelanjutan.

5. Tantangan Tata Kelola Pembangunan Perbatasan

Tantangan utama pembangunan ekonomi perbatasan terletak pada tata kelola yang belum sepenuhnya terintegrasi. Pembangunan kawasan perbatasan melibatkan banyak aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pengelola perbatasan, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Banyaknya aktor tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar kebijakan pembangunan tidak berjalan secara sektoral. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur dapat tidak terhubung dengan penguatan ekonomi lokal, kebijakan perdagangan dapat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kerja sama lintas negara tidak memberikan manfaat langsung bagi penduduk perbatasan.

Tantangan tata kelola juga berkaitan dengan perbedaan regulasi, standar pelayanan, sistem perdagangan, dan kepentingan antarnegara. OECD (2024) menjelaskan bahwa kawasan lintas batas sering tertinggal dibandingkan wilayah nonperbatasan karena adanya hambatan regulasi, perbedaan tata kelola, perbedaan budaya, serta lemahnya

koordinasi multilevel governance. Meskipun kajian OECD berfokus pada konteks lintas batas di Eropa, kerangka tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan aktor lintas negara.

6. Ketimpangan Pembangunan dan Lemahnya Daya Saing Lokal

Ekonomi perbatasan Indonesia masih menghadapi persoalan ketimpangan pembangunan dan lemahnya daya saing lokal. Banyak wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, tetapi belum mampu berkembang optimal karena keterbatasan modal, kualitas produk, kemasan, akses teknologi, serta jaringan distribusi. Akibatnya, masyarakat perbatasan lebih sering menjadi konsumen produk negara tetangga dibandingkan menjadi produsen yang mampu memasuki pasar lintas negara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi perbatasan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi lokal. Pemerintah perlu memperkuat UMKM, koperasi, pasar perbatasan, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, sertifikasi produk, dan promosi komoditas unggulan. Pembangunan wilayah perbatasan yang berkelanjutan harus mampu mengurangi kemiskinan, mendorong investasi, dan menciptakan efek pengganda bagi ekonomi lokal (Rahim et al., 2023). Dengan demikian, penguatan daya saing lokal menjadi kunci untuk mengubah ketergantungan ekonomi menjadi interdependensi yang lebih seimbang.

7. Transformasi Ketergantungan Menuju Interdependensi Produktif

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan tidak selalu harus dipandang sebagai kelemahan mutlak. Ketergantungan dapat menjadi pintu masuk untuk membangun interdependensi ekonomi yang lebih produktif apabila dikelola melalui kebijakan yang tepat. Interdependensi produktif berarti hubungan ekonomi antara masyarakat perbatasan dan negara tetangga berlangsung secara saling menguntungkan, legal, terukur, dan mendukung pembangunan lokal. Dalam perspektif ini, masyarakat perbatasan tidak hanya menjadi konsumen barang dari negara tetangga, tetapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi yang menjual produk lokal, mengembangkan jasa, dan memanfaatkan pasar regional.

Transformasi tersebut membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, negara perlu memperkuat konektivitas domestik agar masyarakat perbatasan tetap terhubung dengan pusat ekonomi nasional. Kedua, pemerintah perlu menciptakan skema perdagangan lintas batas yang sederhana dan berpihak kepada pelaku usaha kecil. Ketiga, kerja sama lintas negara harus dilengkapi dengan agenda pemberdayaan ekonomi lokal. Keempat, kelembagaan perbatasan perlu diperkuat agar mampu mengoordinasikan kebijakan lintas sektor. Hal ini sejalan dengan pandangan Raharjo (2025a) bahwa kerja sama lintas batas perlu melampaui pendekatan konektivitas fisik dan memberi perhatian pada dimensi kelembagaan serta hubungan masyarakat lintas batas.

8. Implikasi Pembangunan Ekonomi Perbatasan Indonesia

Temuan kajian ini memberikan beberapa implikasi penting. Pertama, pembangunan ekonomi perbatasan perlu menggabungkan pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan kerja sama regional. Pendekatan keamanan tetap penting karena kawasan perbatasan berkaitan dengan kedaulatan negara, tetapi pendekatan tersebut perlu dilengkapi dengan strategi ekonomi yang berpihak pada masyarakat lokal. Kedua, pembangunan infrastruktur harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi produktif. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, bukan hanya menjadi simbol kehadiran negara.

Ketiga, kerja sama lintas negara harus diarahkan pada peningkatan daya saing masyarakat perbatasan. Program kerja sama tidak boleh hanya memperlancar mobilitas dan perdagangan, tetapi juga harus memperkuat kapasitas pelaku ekonomi lokal. Keempat, pembangunan ekonomi perbatasan memerlukan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, dan mitra negara tetangga. Dengan tata kelola yang baik, kawasan perbatasan Indonesia dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan (OECD, 2024; Rahim et al., 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa ekonomi perbatasan Indonesia merupakan ruang ekonomi yang kompleks karena berada di antara kepentingan kedaulatan negara, kebutuhan hidup masyarakat lokal, dinamika pasar lintas negara, dan tantangan pembangunan wilayah. Masyarakat perbatasan sering mengalami ketergantungan terhadap negara tetangga karena faktor kedekatan geografis, keterbatasan infrastruktur, lemahnya distribusi barang domestik, perbedaan harga, serta akses pasar yang lebih mudah ke wilayah luar negeri. Ketergantungan tersebut tidak semata-mata menunjukkan lemahnya nasionalisme ekonomi masyarakat perbatasan, melainkan menggambarkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan wilayah yang belum sepenuhnya mampu menyediakan akses ekonomi yang adil dan kompetitif.

Selain itu, perdagangan lintas batas menjadi salah satu aktivitas utama yang menopang kehidupan masyarakat perbatasan. Aktivitas ini berlangsung dalam bentuk formal maupun informal. Perdagangan informal muncul karena kebutuhan praktis masyarakat, hubungan sosial-budaya, serta tingginya biaya transaksi dalam sistem perdagangan resmi. Meskipun perdagangan informal membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, aktivitas tersebut juga dapat menimbulkan persoalan tata kelola, pengawasan, perpajakan, dan risiko penyelundupan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perbatasan perlu diarahkan pada formalisasi yang inklusif, yaitu menyediakan mekanisme perdagangan legal yang sederhana, murah, dan sesuai dengan karakter sosial ekonomi masyarakat lokal.

Kerja sama lintas negara memiliki peran strategis dalam mengubah ketergantungan ekonomi menjadi interdependensi yang produktif. Kerja sama tersebut tidak hanya perlu dilakukan pada level pemerintah pusat, tetapi juga harus melibatkan pemerintah daerah,

pelaku usaha, komunitas lokal, lembaga adat, dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan kolaboratif, kawasan perbatasan dapat dikembangkan sebagai ruang ekonomi yang saling menguntungkan, bukan hanya sebagai wilayah pinggiran atau zona keamanan. Kerja sama lintas negara yang efektif dapat memperkuat perdagangan legal, meningkatkan mobilitas ekonomi, mengembangkan pariwisata perbatasan, serta membuka peluang pasar bagi produk lokal Indonesia.

Tantangan utama pembangunan ekonomi perbatasan terletak pada keterbatasan konektivitas, lemahnya daya saing lokal, belum optimalnya kelembagaan ekonomi, serta tata kelola pembangunan yang masih bersifat sektoral. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, Pos Lintas Batas Negara, pasar perbatasan, dan fasilitas logistik memang penting, tetapi belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas produksi masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan perbatasan harus diarahkan pada pengembangan UMKM, koperasi, akses pembiayaan, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, digitalisasi ekonomi, dan integrasi pasar domestik dengan pasar regional.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa ekonomi perbatasan Indonesia perlu dipahami sebagai ruang interdependensi yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketergantungan terhadap negara tetangga harus ditransformasikan menjadi hubungan ekonomi lintas negara yang legal, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang menggabungkan pendekatan keamanan, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama regional. Dengan demikian, kawasan perbatasan Indonesia dapat berkembang menjadi beranda depan negara yang tidak hanya kuat secara politik dan teritorial, tetapi juga mandiri, inklusif, dan kompetitif secara ekonomi.

Daftar Pustaka

- OECD. (2024). *Building more resilient cross-border regions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d5fd3e59-en>
- Raharjo, S. N. I. (2025a). Reimagining cross-border cooperation from Indonesia–Malaysia experiences: A thematic literature review. *Journal of ASEAN Studies*.
- Raharjo, S. N. I. (2025b). Indonesia–Malaysia cross-border cooperation in managing mobility. *Asia-Pacific Social Science Review*, 25(1).
- Rahim, D. A., Santoso, D. B., & Sasongko, G. (2023). Sustainable development of Indonesia's land border areas: Overview from an economic perspective. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*.
- Rudiatin, E. (2025). Local-global economy at the Indonesia–Malaysia border: Cross-border trade between Temajuk and Telok Melano. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*.
- Sari, Y. (2024). *Cross-border cooperation in the socio-economic development of the Indonesia–Malaysia border area: A case study of Sosek-Malindo cooperation*. Universitas Islam Indonesia.
- Nalle, F. W. (2025). Dynamics of the underground economy in border areas. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*.

- Prameswari, S. R., Hamzah, M. Z., & colleagues. (2024). Policy analysis on border trade between Indonesia and Malaysia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*.
- Pugu, M. R. (2025). A case study of the Sota, Merauke Cross-Border Post and socio-economic dynamics in the Indonesia–Papua New Guinea border area. *International Journal of Social Research*.
- Syafri, M. (2025). Ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia terhadap produk Malaysia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*.
- Sari, R. K., & Putra, A. M. (2024). Border trade and local economic resilience in Indonesia–Malaysia border areas. *Journal of Regional and Rural Development Planning*.
- Yuniarto, P. R. (2023). Border communities, cross-border mobility, and socio-economic interaction in Indonesia’s frontier areas. *Masyarakat Indonesia*.
- Widodo, T., & Permana, C. T. (2022). Regional development policy and infrastructure connectivity in Indonesian border areas. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*.
- Firdaus, M., & Suryani, E. (2021). Cross-border trade, local market integration, and economic development in Indonesia’s border regions. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Lestari, D., & Nugroho, R. A. (2021). Governance challenges in border area development: Evidence from Indonesia’s outermost regions. *Indonesian Journal of Geography*.
- Siburian, R. (2020). Development inequality and socio-economic dynamics in Indonesia’s border regions. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 145–160.
- Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020–2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- BNPP. (2021). *Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020–2024*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- World Bank. (2021). *Connecting to thrive: Challenges and opportunities of transport integration in developing regions*. World Bank.
- UNDP. (2022). *Sustainable development and local economic transformation in border regions*. United Nations Development Programme.